



**UNIVERSITAS MERCU BUANA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

ABSTRAK

Kurniawan Prasetyo (55215110030)

**Koalisi Dominan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan
Good Governance Melalui Informasi Publik**

Jumlah halaman : xii + 144 halaman + 53 lampiran

Bibliografi : 27 acuan, Tahun 1992 - 2012

Humas pemerintah terkendala dalam menjalankan fungsi manajerialnya, yaitu terkendala urusan koordinasi dalam pelaksanaan pusat komando untuk merumuskan agenda kebijakan. Humas DPR RI tidak berada pada posisi yang strategis dalam struktur organisasi. Hal ini mungkin dapat menjadi kendala terlaksananya pelayanan informasi publik yang baik kepada masyarakat, karena praktisi humas biasanya tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional, kecuali ia duduk dalam jajaran *top management* yang biasa disebut sebagai koalisi dominan.

Sebagai landasan dari penelitian ini, peneliti menggunakan konsep koalisi dominan oleh James E. Grunig. Kemampuan seorang public relations yang dapat diterima oleh koalisi dominan dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran dan fungsinya yaitu sebagai pembuat keputusan strategis, *boundary spanner*, dan manajemen strategis. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Humas Sekretariat Jenderal DPR RI tidak termasuk ke dalam koalisi dominan organisasi dan tidak mewakili konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Peran dan fungsi Humas dalam koalisi dominan berada pada Pejabat Eselon II, yaitu Biro Pemberitaan Parlemen. Sedangkan untuk organisasi, koalisi dominan berada pada Sekretaris Jenderal dan Deputi, yang merupakan pejabat eselon I dalam organisasi.

Dalam mewujudkan *good governance* melalui informasi publik, koalisi dominan Humas berada pada Biro Pemberitaan Parlemen dengan melakukan integrasi antara Humas dan unit kerja lain dalam lingkup internal Biro. Humas di DPR RI hanya nomenkratur (penamaan) saja, namun fungsi kehumasan sesungguhnya berada pada Biro Pemberitaan Parlemen.



**UNIVERSITAS MERCU BUANA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

ABSTRACT

Kurniawan Prasetyo (55215110030)

Dominant Coalition Public Relations of DPR RI in Achieve Good Governance Through Public Information

Total of Pages : xii + 144 pages + 53 attachments

Bibliography : 27 references, years of 1992 - 2012

Government PR is constrained in performing managerial function, which is constrained affairs coordination in the implementation of the command center to formulate policy agenda. PR of DPR RI is not in a strategic position within the organizational structure. This may be an obstacle implementation of good public information services to the public, because the public relations practitioners usually do not have the freedom to act as a professional, unless they sat in the ranks of top management that commonly referred to as the dominant coalition.

As the cornerstone of this study, researcher used the concept of the dominant coalition by James E. Grunig. The ability of a public relations that can be accepted by the dominant coalition in an organization cannot be separated from the role and function is as a strategic decision maker, boundary spanner, and strategic management. This study uses a constructivist paradigm with the case study method. The data collection is done by in-depth interviews.

Based on the results of research and data analysis, it could be concluded that the Public Relations of DPR RI does not belong to the dominant coalition of organizations and do not represent the concepts used in this study. The role and function of PR in the dominant coalition lies on echelon II, namely The News Parliament Bureau. For the organization, the dominant coalition lies on Deputy and General-Secretary, which is the echelon I of the organization.

In order to realize good governance through public information, the dominant coalition public relations lies on The News Parliament Bureau with integration between public relations and other work units within the scope of internal Bureau. Public Relations in DPR RI only a labeling, but the real public relations functions carried by The News Parliament Bureau.